

---

## PENANGAN JENAZAH TIDAK UTUH DALAM SITUASI DARURAT: ANALISIS PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN SAINS FORENSIK

**Taufiq**

Universitas Islam Batang Hari (UNISBA)

[Taufiqustad1978@gmail.com](mailto:Taufiqustad1978@gmail.com)

**Rahmat Hidayat**

STAI Ma'arif Sintang

[Rahmathidayat5195@gmail.com](mailto:Rahmathidayat5195@gmail.com)

**Irwan**

Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang

[Irwansimple95@gmail.com](mailto:Irwansimple95@gmail.com)

### Article History:

Received: April 12, 2026;

Accepted: May 28, 2026;

Published: June 02, 2026;

**Abstract.** *The handling of incomplete corpses in emergency situations presents a complex issue, considering the importance of respecting the deceased in Islam and the challenges faced in emergency conditions such as natural disasters or accidents. This study aims to analyze the handling of incomplete corpses from the perspectives of Islamic law and forensic science. Specifically, this research examines Islamic legal provisions regarding the burial of incomplete corpses and discusses the dilemmas that arise in emergency situations, such as time constraints and the condition of the body. On the other hand, forensic science provides technical guidelines for identifying incomplete corpses and the procedures required to ensure the deceased's rights are respected, such as forensic analysis to recognize the identity of the deceased and further investigation. The research method used is a qualitative approach with an in-depth literature review on Islamic law related to corpse handling in emergency conditions, as well as the application of forensic principles in handling incomplete corpses. The findings show that although Islamic law regulates corpse handling in detail, in emergency situations, the procedures can be adjusted according to the principle of public welfare without diminishing the obligation to respect the deceased. In the context of forensic science, identification of incomplete corpses can still be performed using appropriate techniques, although standard procedures may not be fully applicable.*

### Keywords:

*Corpse Handling, Islamic Law, Forensic Science, Incomplete Corpses, Corpses Identification*

**Abstrak.** Penanganan jenazah yang tidak utuh dalam situasi darurat merupakan permasalahan yang kompleks, mengingat pentingnya penghormatan terhadap jenazah dalam Islam serta tantangan yang dihadapi dalam kondisi darurat seperti bencana alam atau kecelakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan jenazah yang tidak utuh dari perspektif hukum Islam dan sains forensik. Secara khusus, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum Islam mengenai tata cara penguburan jenazah dalam kondisi yang tidak utuh dan membahas dilema yang muncul dalam situasi darurat, seperti keterbatasan waktu dan kondisi jenazah yang tidak sempurna.

Di sisi lain, sains forensik memberikan panduan teknis mengenai identifikasi jenazah yang tidak utuh dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan hak-hak jenazah tetap dihormati, seperti analisis forensik untuk mengenali identitas jenazah serta penyelidikan lebih lanjut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur yang mendalam terhadap hukum Islam terkait pengurusan jenazah dalam kondisi darurat, serta penerapan prinsip-prinsip forensik dalam penanganan jenazah yang tidak utuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam mengatur penanganan jenazah secara rinci, dalam situasi darurat, pelaksanaan prosedur dapat disesuaikan dengan prinsip kemaslahatan umum tanpa mengurangi kewajiban menghormati jenazah. Dalam konteks sains forensik, identifikasi jenazah yang tidak utuh tetap dapat dilakukan dengan teknik yang sesuai, meskipun prosedur standar mungkin tidak dapat diterapkan sepenuhnya.

## A. PENDAHULUAN

Penanganan jenazah merupakan salah satu aspek yang sangat dijaga dalam agama Islam, yang menekankan penghormatan dan pelaksanaan prosedur pengurusan jenazah secara sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam hukum Islam, jenazah harus diperlakukan dengan penuh penghormatan, yang mencakup kewajiban untuk segera dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan. Ketentuan-ketentuan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kehormatan jenazah, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak jenazah dan keluarganya tetap dihormati (Fitriani et al., 2020). Proses-proses ini memiliki dasar yang kuat dalam al-Qur'an dan hadis, yang secara jelas mengatur tata cara pengurusan jenazah.

Dalam beberapa situasi darurat, seperti bencana alam, kecelakaan massal, atau tindakan kriminal yang melibatkan kekerasan, kondisi jenazah yang tidak utuh sering kali menjadi masalah besar dalam proses pengurusan jenazah. Di Indonesia, yang sering menghadapi bencana alam besar seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir, banyak jenazah yang ditemukan dalam kondisi yang tidak utuh. Keadaan ini menimbulkan dilema besar baik dari segi hukum Islam maupun aspek teknis, khususnya dalam identifikasi dan penghormatan terhadap jenazah (Kalam Daud & Kamalussafir, 2018).

Bencana alam, seperti tsunami yang terjadi pada 2004 di Aceh atau gempa bumi di Yogyakarta pada 2006, memperlihatkan tantangan yang dihadapi dalam menangani jenazah yang tidak utuh. Dalam situasi darurat semacam itu, terbatasnya waktu, tenaga, dan sarana pengurusan jenazah sering kali membuat prosedur pengurusan jenazah tidak bisa dilakukan secara utuh (Samantha et al., 2023). Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana hukum Islam memandang penanganan jenazah dalam kondisi seperti ini. Apakah prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam masih dapat diterapkan dalam situasi darurat yang penuh keterbatasan? Bagaimana jika sebagian besar tubuh jenazah tidak ditemukan, atau jika jenazah dalam kondisi yang sangat rusak?

Pada kajian forensik, penanganan jenazah yang tidak utuh membutuhkan pendekatan teknis yang dapat memastikan identifikasi jenazah secara akurat. Sains forensik, khususnya dalam hal identifikasi korban bencana, memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa jenazah yang ditemukan, meskipun dalam kondisi tidak utuh, dapat dikenali dan diperlakukan dengan benar sesuai dengan hak-haknya (Alya & Yusuf, 2026). Proses identifikasi jenazah dalam situasi seperti ini mencakup penggunaan metode forensik, seperti identifikasi melalui sidik jari, DNA, dan analisis gigi, yang memungkinkan pihak berwenang untuk memastikan siapa jenazah tersebut, meskipun bagian tubuhnya tidak lengkap (Muhammad et al., 2020). Dalam konteks ini, kolaborasi antara hukum Islam dan sains forensik menjadi sangat relevan.

Hukum Islam tidak secara eksplisit mengatur penanganan jenazah yang tidak utuh dalam situasi darurat, karena hukum ini lebih banyak mengatur tata cara pengurusan jenazah dalam kondisi normal (Prasetio et al., 2024). Namun, prinsip-prinsip hukum Islam seperti menghormati martabat manusia, menjaga hak-hak jenazah, dan memberikan perhatian khusus pada setiap bagian tubuh jenazah tetap harus diperhatikan, bahkan dalam situasi darurat. Dalam hal ini, ulama kontemporer berpendapat bahwa prinsip dasar hukum Islam terkait penanganan

jenazah, yaitu menghormati jenazah dan tidak mengabaikannya, tetap dapat diterapkan meskipun ada kekurangan dalam pelaksanaannya.

Dalam konteks hukum Islam, terdapat ketentuan mengenai penguburan jenazah dalam keadaan tidak utuh. Menurut para ulama, jika bagian tubuh jenazah tidak ditemukan, maka yang terpenting adalah niat dan usaha untuk tetap melakukan penguburan dengan cara yang sesuai dengan syariat, meskipun tubuh jenazah tidak utuh (Lembong, 2017). Dalam beberapa kasus, jika jenazah sangat sulit dikenali, hukum Islam mengizinkan untuk dilakukan penguburan dalam keadaan terbatas, asalkan niat untuk menghormati jenazah tetap dijaga.

Dalam kajian sains forensik, penanganan jenazah yang tidak utuh juga memerlukan pendekatan yang berbeda. Dalam kondisi darurat, teknik-teknik forensik seperti identifikasi menggunakan DNA, sidik jari, dan analisis forensik lainnya sangat diperlukan untuk memastikan identitas korban dan memastikan bahwa jenazah tersebut dihormati sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum agama maupun hukum Negara (Azmi, 2021). Sains forensik dapat menyediakan bukti ilmiah yang diperlukan untuk mendukung pengurusan jenazah secara baik, meskipun dalam kondisi yang tidak sempurna.

Meskipun ada kemajuan dalam bidang forensik, permasalahan yang muncul adalah bagaimana kedua bidang ini—hukum Islam dan sains forensik—dapat bekerja sama dalam situasi darurat (Habiburrahman & Yudhistira, 2021). Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa proses identifikasi dan penguburan jenazah yang tidak utuh dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penghormatan jenazah dalam Islam, sekaligus memanfaatkan kemajuan dalam sains forensik untuk memastikan identifikasi yang akurat (Hadi et al., 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis mengenai bagaimana hukum Islam memandang penanganan jenazah yang tidak utuh dalam situasi darurat dan bagaimana sains forensik dapat mendukung pelaksanaan prosedur tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali solusi terhadap masalah-masalah praktis yang dihadapi dalam penanganan jenazah yang tidak utuh, dengan

mempertimbangkan kondisi darurat yang sering kali membatasi pelaksanaan prosedur pengurusan jenazah secara utuh. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji apakah ada ruang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan teknik-teknik forensik yang ada, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat dan seimbang dalam penanganan jenazah yang tidak utuh dalam situasi darurat (Razak et al., 2025). Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi tentang bagaimana memperlakukan jenazah yang tidak utuh dalam situasi darurat, dengan tetap menghormati hukum Islam dan menggunakan teknologi forensik secara maksimal untuk memastikan bahwa hak-hak jenazah tetap dihormati.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk menganalisis penanganan jenazah yang tidak utuh dalam situasi darurat dari perspektif hukum Islam dan sains forensik. Metode ini dipilih karena mampu menggali pemahaman mendalam tentang ketentuan hukum Islam terkait pengurusan jenazah yang tidak utuh, serta penerapan teknik-teknik forensik dalam kondisi darurat. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data kualitatif yang relevan untuk memahami pandangan hukum Islam dan prosedur sains forensik dalam konteks penanganan jenazah yang tidak utuh. Tahapan Penelitian Meliputi;

### **1. Studi Literatur**

Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan literatur yang relevan mengenai hukum Islam terkait dengan pengurusan jenazah dalam kondisi darurat, serta prinsip-prinsip dasar yang mengatur tata cara penguburan jenazah dalam Islam. Selain itu, kajian juga mencakup literatur tentang teknik-teknik forensik dalam identifikasi jenazah yang tidak utuh. Studi literatur ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman teoritis yang mendalam mengenai kedua perspektif tersebut.

## 2. Analisis Dokumen

Dokumen-dokumen terkait, seperti fatwa-fatwa ulama, buku teks hukum Islam, serta artikel-artikel ilmiah tentang forensik, akan dianalisis untuk mengidentifikasi keselarasan antara hukum Islam dan praktik-praktik forensik dalam penanganan jenazah yang tidak utuh. Dokumen-dokumen ini akan dianalisis untuk melihat bagaimana keduanya dapat saling melengkapi dalam situasi darurat.

## 3. Wawancara dengan Ahli

Wawancara semi-terstruktur akan dilakukan dengan para ahli hukum Islam, ulama, serta profesional dalam bidang forensik, seperti ahli patologi forensik dan ahli identifikasi jenazah. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan pandangan praktis tentang bagaimana penanganan jenazah yang tidak utuh seharusnya dilakukan dalam situasi darurat, serta bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan teknik-teknik forensik.

## 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi literatur dan wawancara akan dianalisis secara tematik. Analisis ini akan mengidentifikasi tema-tema utama yang terkait dengan penanganan jenazah yang tidak utuh, baik dari sisi hukum Islam maupun dari perspektif forensik. Hasil analisis ini akan digunakan untuk merumuskan rekomendasi terkait penanganan jenazah dalam situasi darurat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariat dan prosedur ilmiah yang berlaku. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan, solusi, dan kemungkinan integrasi antara hukum Islam dan sains forensik dalam penanganan jenazah yang tidak utuh dalam situasi darurat.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penanganan Jenazah yang Tidak Utuh dalam Situasi Darurat

Penanganan jenazah dalam Islam merupakan bagian dari kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Muslim dengan penuh penghormatan, tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat

manusia. Hukum Islam, yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, serta ijtihad para ulama, mengatur dengan rinci tata cara pengurusan jenazah yang meliputi proses memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan jenazah (Darlis, 2018). Namun, dalam situasi darurat, seperti bencana alam, kecelakaan massal, atau situasi perang, penanganan jenazah yang tidak utuh menjadi tantangan tersendiri (Harry et al., 2024).

Hukum Islam tidak memberikan panduan langsung tentang penanganan jenazah yang tidak utuh dalam situasi darurat. Namun, prinsip dasar yang ada dalam Islam adalah untuk menghormati jenazah, menjaga martabatnya, serta memastikan proses penguburan dilakukan dengan niat yang baik (Puspita et al., 2025). Beberapa ulama berpendapat bahwa dalam kondisi darurat, seperti bencana yang menyebabkan jenazah dalam keadaan terpotong atau rusak, yang terpenting adalah niat untuk menghormati jenazah dan menguburkannya dengan cara yang sesuai dengan kemampuan yang ada (JASMINE, 2014).

Hukum Islam memberikan ruang untuk fleksibilitas, yakni dapat disesuaikan dengan kondisi darurat yang dihadapi. Misalnya, jika sebagian tubuh jenazah tidak ditemukan atau sangat rusak, penguburan tetap harus dilakukan secepat mungkin dengan tetap menjaga prinsip dasar penghormatan terhadap jenazah (Siregar, 2025). Hal ini sejalan dengan kaidah fihiyyah yang menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, suatu kewajiban dapat diringankan atau disesuaikan untuk tujuan kemaslahatan umat, tanpa mengurangi makna penghormatan terhadap jenazah.

Ulama juga menekankan bahwa penghormatan terhadap jenazah tidak hanya terbatas pada penguburan, tetapi juga pada cara jenazah diperlakukan sebelum dan sesudah meninggal (Aprianto et al., 2021). Dalam kasus-kasus tertentu, seperti korban bencana alam, hukum Islam mengedepankan prinsip menghargai martabat korban dan keluarga korban. Dalam konteks ini, beberapa pendapat menyarankan agar jika jenazah tidak utuh, bagian-bagian tubuh yang

ditemukan tetap harus dikuburkan secara terpisah, tetapi dengan tetap memperhatikan adab yang ditetapkan dalam syariat Islam.

Penting untuk diingat bahwa dalam situasi seperti bencana, faktor waktu dan keterbatasan sumber daya dapat memengaruhi proses penguburan jenazah. Oleh karena itu, dalam kondisi darurat, pengurusan jenazah dapat dilakukan dengan prioritas pada kecepatan dan penghormatan, meskipun tidak sepenuhnya mengikuti prosedur ideal. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan toleransi selama tidak ada pengabaian terhadap hak-hak jenazah secara prinsipial.

Sebagai contoh, dalam tragedi tsunami Aceh pada tahun 2004, banyak jenazah yang ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Para ulama pada saat itu berpendapat bahwa meskipun jenazah tidak ditemukan secara lengkap, penguburan harus tetap dilakukan sesuai dengan syariat Islam dengan tujuan agar jenazah tetap dihormati (Sari, 2021). Proses ini didasarkan pada prinsip maslahat dan kewajiban untuk segera menuntaskan penguburan, demi menghindari kerusakan lebih lanjut pada jenazah (Gracia In Junika Tatodi, 2019).

Dalam konteks hukum Islam, ada pula perdebatan mengenai apakah jenazah yang tidak utuh dapat diperlakukan seperti jenazah utuh dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam hal shalat jenazah. Meskipun sebagian besar ulama sepakat bahwa shalat jenazah hanya dilakukan pada jenazah yang utuh, ada juga pandangan yang memperbolehkan shalat jenazah dilakukan meskipun jenazah tidak utuh, dengan alasan bahwa niat untuk menghormati jenazah tetap menjadi prioritas utama (Koritelu et al., 2024). Hal ini menggambarkan bahwa hukum Islam mengutamakan niat dan usaha dalam menghormati jenazah, meskipun kondisi fisik jenazah tidak sempurna.

Fatwa kontemporer mengizinkan penguburan jenazah yang tidak utuh di tempat yang sama, dengan syarat dilakukan dengan penuh kehormatan, seperti yang dilakukan pada bencana besar lainnya (McCormack, 2015). Hal ini memberikan ruang bagi penanganan jenazah yang lebih fleksibel dalam kondisi

darurat, tanpa mengurangi makna dan tujuan dari prosesi penguburan itu sendiri.

## 2. Pendekatan Forensik dalam Penanganan Jenazah yang Tidak Utuh

Penanganan jenazah yang tidak utuh menghadirkan tantangan teknis yang besar, terutama dalam hal identifikasi jenazah. Dalam kondisi darurat, seperti bencana alam atau kecelakaan massal, proses identifikasi jenazah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa jenazah tersebut dapat dikenali dan diberi penghormatan yang layak (Bastiar, 2021). Untuk itu, sains forensik menggunakan berbagai metode ilmiah, seperti analisis DNA, sidik jari, serta identifikasi melalui gigi dan tulang, guna mengidentifikasi korban.

Salah satu teknik yang paling sering digunakan dalam identifikasi jenazah yang tidak utuh adalah analisis DNA. Meskipun bagian tubuh jenazah tidak utuh, sisa-sisa tubuh seperti darah, rambut, atau jaringan tubuh lainnya dapat digunakan untuk mengambil sampel DNA yang kemudian dianalisis untuk menentukan identitas jenazah (Muhammad et al., 2020). Proses ini sangat bergantung pada teknologi laboratorium dan keterampilan teknis, yang memungkinkan jenazah yang terpotong atau hancur dapat diidentifikasi dengan akurat.

Selain analisis DNA, metode identifikasi lainnya yang sering digunakan adalah analisis gigi. Gigi memiliki daya tahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya, sehingga sering kali tetap utuh meskipun tubuh mengalami kerusakan parah (Suhaimi et al., 2023). Dengan menggunakan data rekam medis atau catatan gigi, forensik dapat mengidentifikasi jenazah meskipun hanya bagian gigi yang ditemukan. Proses ini membantu memastikan bahwa korban bencana dapat dikenali dengan benar, sehingga hak-haknya dapat dihormati dan proses penguburan dapat dilakukan sesuai dengan identitasnya.

Namun, dalam situasi darurat yang sangat mendesak, seperti saat tsunami atau gempa bumi besar, teknik-teknik identifikasi ini sering kali

terkendala oleh keterbatasan waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, prioritas utama adalah melakukan identifikasi dengan metode yang paling cepat dan efektif, meskipun tidak semua jenazah dapat diidentifikasi secara lengkap. Forensik juga berperan penting dalam proses pengumpulan bukti dan investigasi lebih lanjut, jika diperlukan. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan kecelakaan atau tindakan kriminal, forensik dapat membantu mengidentifikasi penyebab kematian dan memberikan bukti yang dibutuhkan untuk proses hukum. Dalam kasus bencana alam, forensik berperan dalam mengidentifikasi jumlah korban dan jenis kelamin, yang pada gilirannya membantu dalam proses administrasi penguburan dan distribusi bantuan.

Tantangan utama dalam penanganan jenazah yang tidak utuh dalam situasi darurat adalah keterbatasan fasilitas dan tenaga ahli (B. Anjelia, R. Syifa Najwa, S. Alifia Hidayat, 2024). Banyak daerah yang terkena bencana besar tidak memiliki fasilitas laboratorium forensik yang memadai, sehingga identifikasi jenazah menjadi lebih sulit dilakukan dengan cara yang akurat dan cepat. Dalam hal ini, pihak berwenang sering kali bekerja sama dengan lembaga forensik dari luar daerah atau negara untuk memberikan bantuan teknis dalam proses identifikasi.

Pentingnya sinergi antara hukum Islam dan sains forensik sangat terlihat dalam penanganan jenazah yang tidak utuh (Ummah, 2019). Sains forensik menyediakan solusi teknis untuk mengidentifikasi jenazah, sementara hukum Islam memberikan panduan moral dan etika dalam memperlakukan jenazah. Kolaborasi antara keduanya memastikan bahwa meskipun kondisi jenazah tidak utuh, proses pengurusan tetap dilakukan dengan menghormati hak-hak jenazah dan mengikuti prinsip-prinsip agama yang berlaku.

### **3. Integrasi Hukum Islam dan Forensik dalam Penanganan Jenazah Tidak Utuh**

Integrasi hukum Islam dan forensik dalam penanganan jenazah tidak utuh merupakan kebutuhan penting dalam situasi bencana, kecelakaan, konflik bersenjata, tindak pidana, ledakan, kebakaran, atau peristiwa lain yang

menyebabkan tubuh korban tidak ditemukan secara lengkap. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek medis-teknis, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap martabat manusia, kepastian identitas korban, hak keluarga, serta kewajiban keagamaan dalam penyelenggaraan jenazah (Arifin, 2016). Oleh karena itu, penanganannya perlu dilakukan secara terpadu antara norma hukum Islam, prinsip hukum internasional, dan prosedur forensik modern.

Dalam hukum Islam, jenazah tetap memiliki kehormatan sebagaimana manusia ketika hidup. Prinsip *karāmah al-insān* menegaskan bahwa tubuh manusia tidak boleh diperlakukan secara sembarangan, baik dalam keadaan hidup maupun setelah meninggal dunia. Karena itu, jenazah Muslim wajib diperlakukan dengan hormat melalui proses memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan (Samantha et al., 2023). Namun, ketika jenazah tidak utuh, rusak berat, atau hanya ditemukan sebagian anggota tubuh, fikih memberikan ruang kemudahan berdasarkan kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir*, yaitu kesulitan dapat menghadirkan keringanan hukum. Bagian tubuh yang ditemukan tetap harus dihormati, dibungkus secara layak, dishalatkan menurut pendapat ulama yang membolehkan, dan dikuburkan dengan tata cara yang menjaga martabatnya. ICRC juga mencatat bahwa dalam perspektif hukum Islam, anggota tubuh yang terpisah tetap harus diperlakukan secara bermartabat dan dikuburkan secara layak.

Ilmu forensik berperan sebagai instrumen ilmiah untuk memastikan identitas korban dan menjelaskan sebab kematian. Pada jenazah tidak utuh, identifikasi visual sering kali tidak memadai. Karena itu, diperlukan pemeriksaan sidik jari, gigi, DNA, antropologi forensik, barang pribadi, pakaian, serta pencocokan data ante-mortem dan post-mortem (Bintarawati et al., 2023). INTERPOL melalui pedoman Disaster Victim Identification menempatkan proses identifikasi korban dalam beberapa tahap, termasuk pemeriksaan tempat kejadian, pengumpulan data post-mortem, pengumpulan data ante-mortem, dan

rekonsiliasi data. Pemeriksaan post-mortem dapat mencakup data biometrik seperti sidik jari, data gigi, dan DNA. Dengan demikian, forensik tidak bertentangan dengan hukum Islam selama dilakukan atas dasar kebutuhan yang sah, proporsional, tidak merendahkan jenazah, dan bertujuan menjaga hak korban serta keluarganya.

Dalam hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional, jenazah korban harus dihormati dan dilindungi. Hukum kebiasaan humaniter internasional melarang mutilasi jenazah dan mewajibkan pihak-pihak dalam konflik mengambil langkah yang memungkinkan untuk mencegah penodaan atau penjarahan terhadap orang yang telah meninggal. ICRC juga menegaskan bahwa orang yang meninggal dalam konflik bersenjata harus diperlakukan dengan hormat, dilindungi, dicari, dikumpulkan, diidentifikasi, dan dikelola dengan memperhatikan hak keluarga serta keyakinan keagamaan korban. Prinsip ini sejalan dengan hukum Islam yang menempatkan penghormatan terhadap jenazah sebagai bagian dari perlindungan martabat manusia.

Dengan demikian, integrasi hukum Islam dan forensik dapat dipahami sebagai model penanganan jenazah tidak utuh yang menggabungkan kepatuhan syariah, kepastian ilmiah, dan standar kemanusiaan internasional. Hukum Islam memberikan kerangka etik-religius agar jenazah tetap dihormati, sementara forensik menyediakan metode ilmiah untuk identifikasi dan pembuktian hukum. Hukum internasional memperkuat keduanya melalui prinsip perlindungan martabat manusia dan hak keluarga untuk mengetahui nasib korban. Dalam praktiknya, integrasi ini menuntut kerja sama antara aparat penegak hukum, tenaga medis-forensik, tokoh agama, lembaga kemanusiaan, dan keluarga korban. Prosedur yang ideal meliputi pengamanan lokasi, dokumentasi bagian tubuh, identifikasi forensik, konsultasi fikih, pencatatan administratif, serta pemakaman sesuai agama korban sejauh memungkinkan. Model ini penting agar penanganan jenazah tidak utuh tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, manusiawi, religius, dan sesuai dengan standar kemanusiaan global.

---

## D. KESIMPULAN

Penanganan jenazah tidak utuh dalam situasi darurat merupakan persoalan yang menuntut pendekatan terpadu antara hukum Islam dan sains forensik. Dalam perspektif hukum Islam, jenazah tetap memiliki kehormatan yang wajib dijaga meskipun tubuhnya tidak lagi lengkap akibat bencana, kecelakaan, konflik, kebakaran, atau tindak pidana. Prinsip penghormatan terhadap martabat manusia menjadi dasar bahwa setiap bagian tubuh yang ditemukan harus diperlakukan secara layak, tidak diabaikan, dan diurus sesuai kemampuan. Ketentuan fikih memberikan ruang kemudahan dalam kondisi darurat melalui kaidah bahwa kesulitan dapat mendatangkan keringanan hukum. Oleh karena itu, apabila proses memandikan jenazah tidak memungkinkan, maka dapat ditempuh cara lain yang tetap menjaga nilai kesucian, kehormatan, dan kemanusiaan.

Sains forensik memiliki peran penting dalam mendukung penanganan jenazah tidak utuh, terutama untuk memastikan identitas korban, mengetahui sebab kematian, serta membantu proses hukum dan administrasi keluarga. Pemeriksaan DNA, sidik jari, odontologi forensik, antropologi forensik, serta pencocokan data korban menjadi instrumen ilmiah yang dapat memberikan kepastian. Dalam konteks ini, forensik tidak bertentangan dengan hukum Islam selama dilakukan secara proporsional, beretika, dan bertujuan untuk kemaslahatan.

## REFERENSI

- alya, A. N., & Yusuf, K. M. (2026). Integrasi Islam Dan Sains Dalam Pembelajaran Fiqh Integration Of Islam And Science In Fiqh Learning. *Indonesian Journal Of Islamic Studies (Ijis)*, 2(1), 130–138.
- Aprianto, M., Ulfa, S., & Husna, A. (2021). Pengembangan Multimedia Interaktif Mobile Learning Pengurusan Jenazah. *Jktp: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 4(1), 23–32. <https://doi.org/10.17977/Um038v4i12021p023>
- Arifin, M. (2016). Islam dan akulturasi Budaya Lokal Di Aceh (Studi Terhadap Ritual Rah Uleidi Kuburan Dalam Masyarakat Pidie Aceh). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 251–284.

- Azmi, A. (2021). Bedah Mayat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Taqnin : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 03(01), 1–20.
- B. Anjelia, R. Syifa Najwa, S. Alifia Hidayat, S. R. A. (2024). Review Of Jinayah Fiqh And The Criminal Code Regarding Sanctions For Theft Committed By Minors . *Djhpi*. <https://doi.org/10.35905/Delictum.V2i2.7655>
- Bastiar, A. (2021). *Bedah Mayat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Penelitian Di Provinsi Aceh)*.
- Bintarawati, F., Lubis, A. F., Iqsandri, R., & Utama, A. S. (2023). Tantangan Dan Prospek Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Rohingya Di Indonesia Dari Perspektif Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(12), 1169–1180. <https://doi.org/10.58812/Jhhws.V2i12.871>
- Darlis, S. (2018). Perpaduan Metode Tematik-Interdisipliner Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam. *Samarah*, 2(2), 335–351. <https://doi.org/10.22373/Sjhc.V2i2.4741>
- Fitriani, L., Munjiah, M., & Muassomah, M. (2020). Pemberdayaan Perempuan Dalam Pelatihan Pengurusan Jenazah Melalui Metode Demonstrasi Di Kelurahan Tasikmadu Kota Malang. *Journal Of Research On Community Engagement*, 1(2), 48. <https://doi.org/10.18860/Jrce.V1i2.8019>
- Gracia In Junika Tatodi. (2019). Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang. *Lex Crimen*, 8(8), 126–137.
- Habiburrahman, M., & Yudhistira, A. (2021). Autopsi Virtual (Virtopsy): Tinjauan Etik, Bioetika, Sosial, Budaya, Agama, Dan Medikolegal. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.26880/Jeki.V5i1.52.ISSN>
- Hadi, S. N., Fuji, S. D., & Hasibuan, L. (2022). Analisis Pembongkaran Jenazah Dalam Prespektif Kedokteran Forensik Untuk Melakukan Otopsi Yang Kedua. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 3(2), 1–16.
- Harry, M., Saifullah, Jundiani, & Fajarani, M. (2024). Examining The Provision Of Legal And Religious Education To Islamic Families To Safeguard The Rights And Well-Being Of Women And Children: A Case Study Conducted In Malang Regency, East Java. *Samarah*, 8(3), 1526–1546. <https://doi.org/10.22373/Sjhc.V8i3.19566>
- JASMINE, K. (2014). Perekrutan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Sebagai

---

Kejahatan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional 1. *Lex Privatum*, 13(1).

Kalam Daud, M., & Kamalussafir, M. (2018). Akurasi Arah Kiblat Komplek Pemakaman Ditinjau Menurut Kaidah Trigonometri (Studi Kasus Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh). *Samarah*, 2(2), 502–529. <https://doi.org/10.22373/Sjhc.V2i2.4750>

Koritelu, E. P. E., Sihombing, M. C., Izzulhaq, M. H., & Millatina Ediani, F. (2024). Aspek Medikolegal Dalam Transplantasi Organ Tubuh Pada Mayat Tanpa Identitas. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 22(1), 66–79. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdmhttp://dx.doi.org/10.56444/hdm.v21i1>

Lembong, R. (2017). Aspek Hukum Terhadap Autopsi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun. *Lex Crimen*, VI(8), 5–11.

Mccormack, T. L. H. (2015). Sixty Years From Nuremberg: What Progress For International Criminal Justice? *Jurnal Hukum Humaniter*, 4(90), 68–73.

Muhammad, F., Sudini, L. P., & Sujana, I. N. (2020). Penegakan Hukum Pidana Internasional Dalam kejahatan Perang Terhadap Kemanusiaan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 88–92. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2381.88-92>

Prasetio, H., Setiawan, D., & Suharyanto, I. (2024). Konsepsi Pengumpulan Data Antemortem Prajurit Tni Al Menggunakan Scanner Intraoral Di Lantamal X Guna Mempercepat Identifikasi Jenazah Dalam Rangka Mendukung Tugas TNI AL. *JIKKDW*, 6(April 2024), 24–34.

Puspita, R., Putri, A. C., Ameliawati, B. A., Prasasti, C., Karomah, I., & Supriyadi, T. (2025). *Penggunaan Cadaver Sebagai Media Pembelajaran Dalam Perspektif Islam Dan Medis Wilayah Sumedang : Kajian Etika , Legalitas , Dan Nilai Lokal Dalam Pendidikan Kesehatan*. 5, 1167–1183.

Razak, A., Saleh, M. M., Aniq, M., Alias, A., Abdul, W., Wan, F., Unit, M., Health, D., Pertahanan, U., Lumpur, K., Sains, U., Nilai, B. B., Studies, I., Academy, D., Pertahanan, U., Lumpur, K., Sains, U., & Nilai, B. B. (2025). Pengurusan Jenazah Tidak Sempurna Dalam Situasi Perang, Bencana Dan Wabak: Tinjauan Daripada Perspektif Islam Dan Sains Forensik Management Of Incomplete Remains In War, Disaster And Pandemic Situations: An Apraisal From Islamic And Forensic Science Persp. *Malaysian Journal Of Syariah And Law*, 13(3), 652–666.

Samantha, S., Susanti, R., & Adrial, A. (2023). Gambaran Perlukaan Jenazah Di

Bagian Forensik RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2019-2021. *Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia*, 3(4), 323–332.  
<https://doi.org/10.25077/jikesi.v3i4.1038>

- Sari, I. (2021). Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2), 23–43.  
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/766/763>
- Siregar, S. (2025). Identifikasi Jenazah Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 11(1), 50–59.
- Suhaimi, Rezi, M., & Hakim, M. R. (2023). Maqāṣ id Al-Sharī'ah: Teori Dan Implementasi. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2(1), Hlm. 162-166.
- Ummah, M. S. (2019). Pemidanaan Anak Dan Telaah Implementasi Asas Ultimum Remediumperspektif Hukum Pidana Dan Jinayah Islam. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isallowed=Y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isallowed=Y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)